

**KAJI TINDAK:
BENTUK APLIKASI PEMBERDAYAKAN MASYARAKAT
OLEH PERGURUAN TINGGI¹
Ravik Karsidi²**

PENGANTAR

Kaji tindak atau sering disebut riset aksi adalah merupakan kegiatan riset melalui tindakan, riset dengan tindakan, atau riset untuk menunjang tindakan guna menangani masalah yang sungguh-sungguh penting dan berarti bagi masyarakat (Mudjiman yang diadaptasi dari Lewin, 1946; Oquist,1970; dan Sanford,1977). Dalam ujudnya yang operasional , hampir menyerupai siklus perencanaan atas dasar suatu riset oleh masyarakat sendiri, pelaksanaan tindakan, dan penilaian atas tindakan sebagai bentuk refleksi yang telah dijalankan tersebut.

Kegiatan kaji tindak (riset aksi) telah dimulai sejak lama oleh ilmuwan Kurt Lewin yaitu tahun 1946, dan telah dimanfaatkan oleh banyak kalangan, baik aktivis/praktisi pengembangan masyarakat, pendidik maupun peneliti ilmu sosial.

Kaji tindak muncul merupakan koreksi dari perspektif teori kritis bahwa meniru pendekatan ilmu empiris yang tidak cocok untuk studi tentang manusia. Ia muncul sebagai riset alternatif dalam ilmu sosial. Ia berusaha menjadi riset paradigma baru yang berbeda dengan logika positivis dan empiris.

Tulisan singkat ini bermaksud menguraikan bagaimana kaji tindak dilakukan bagi kepentingan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk aplikasi kegiatan pengabdian masyarakat di Perguruan Tinggi.

KAJI TINDAK: BENTUK RISET PARTISIPATIF

Menurut Lewin (Dilts,1999), hal-hal praktis jika diikuti dengan refleksi dan analisis, akan merupakan sumber yang tak bakal kering bagi bahan pengembangan teori (yang dikembangkan dari lapangan). Karena dalam kenyataannya teori yang demikian jika digunakan sebagai alat analisis akan memberikan contoh praktis yang diterapkan para situasi riil.

Model kaji tindak yang diterapkan dilapangan, meliputi empat langkah, yaitu: aksi/mengalami, refleksi, integrasi, dan perencanaan. Sebagai proses kegiatan operasionalnya menekankan pragmatisme yang dimulai dari mengidentifikasi, memahami, dan memecahkan masalah riil, lalu merefleksikannya lagi.

Dalam perkembangannya, ada varian lain dari riset paradigma bari yaitu riset partisipatif. Ia memiliki banyak ciri yang sama dengan riset aksi antara lain, pentingnya refleksi, tujuan untuk adanya perubahan /perbaikan sosial atau dampak langsung terhadap sistim/struktur sosial, penghargaan yang tinggi terhadap potensi manusia, dan pemecahan masalah, serta penciptaan

¹ Disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen PTN-PTS se Surakarta, LPM UNS, Solo 12-13 Nopember 2001

² Ketua LPM Universitas Sebelas Maret, Doktor Ilmu Penyuluhan Pembangunan, alumni IPB 1999.

pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam riset partisipatif, menurut Dilt (1999) lebih komitment terhadap ideologis yaitu perubahan sosial dan keadilan sosial. Sementara riset aksi lebih menekankan adanya komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat (*empowerment*), partisipasi dan kontrol masyarakat dalam proses riset.

PERAN SOSIAL PERGURUAN TINGGI

Dalam rangka aktualisasi peran Perguruan Tinggi (kami batasi terutama dalam aspek/dharma pengabdian kepada masyarakat), maka peranan makro yang dapat dimainkan antara lain:

1. Perguruan Tinggi memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi perubahan-perubahan suatu masyarakat. Peran dan fungsi perguruan tinggi dapat diwujudkan dalam bentuk membangun gerakan pembelajaran masyarakat untuk mendorong segera terciptanya transformasi sosial.
2. Kini, masih saja terjadi jarak yang lebar antara perguruan tinggi dengan basis-basis perubahan masyarakat yang ada. Tidaklah berlebihan sekiranya perguruan tinggi diharapkan dapat berperan lebih progresif dalam mempengaruhi perubahan masyarakat secara lebih sistematis dan berdampak luas di masa-masa mendatang. Untuk itu kedekatan Perguruan Tinggi dan masyarakat harus diusahakan melalui program kemitraan kelompok-kelompok masyarakat dengan Perguruan Tinggi.
3. Perguruan tinggi dituntut untuk menentukan dan memilih kebijakan yang benar-benar strategis bagi perubahan-perubahan masyarakat yang lebih baik dan bagi penyelesaian masalah-masalah mendasar bangsa saat ini, baik ditingkat nasional maupun lokal.

Untuk itu maka perguruan tinggi (selain pengajaran reguler konvensional) dalam era otonomi daerah harus mampu melakukan upaya-upaya yang bermanfaat dalam bentuk yang lebih operasional , seperti :

1. Mengembangkan model pembangunan yang benar-benar berbasis pada keilmuan dan sumberdaya lokal.
2. Membangun basis-basis pengembangan keilmuan yang benar-benar relevan bagi kebutuhan masyarakat dalam rangka merespon perubahan global yang sangat dinamis.
3. Mengembangkan pusat-pusat pengembangan masyarakat, dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang ada.
4. Membantu pengembangan kebijakan strategis terhadap legislatif dan eksekutif serta mengontrol implementasi kebijakan-kebijakan tersebut.
5. Menghidupkan atau mendorong lembaga-lembaga independen diberbagai level daerah untuk mengimbangi inkorporasi negara yang selama ini masuk kedalam hampir semua sektor kehidupan masyarakat, baik di pusat maupun daerah.
6. Menyebarkan (*dissemination*) berbagai informasi yang masih menjadi masalah yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai cara (*public education*) agar kelompok-kelompok

masyarakat mempunyai kemampuan adaptif menyongsong era otonomi daerah.

RISET, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

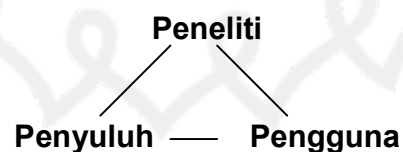
Fungsi utama penyuluhan adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, telaah riset dan pemberdayaan masyarakat dapat dikaitkan dengan penyuluhan. Setidaknya ada dua model riset dan penyuluhan, yaitu model linier dan model triangular.

Yang pertama adalah apa yang disebut dengan model linier. Model ini menyarankan cara kerja keterkaitan riset dan penyuluhan dengan siklus :

Penelitian --> Penyuluhan --> Pengguna.

Siklus ini berpandangan bahwa suatu penelitian agar bermanfaat bagi masyarakat harus diterjemahkan terlebih dahulu oleh penyuluh sebagai mediator, atau terlebih dahulu melalui olahan dari penyuluh. Cara kerja yang demikian berpandangan bahwa masyarakat pengguna selalu diposisikan sebagai yang tidak/kurang tahu dibandingkan penyuluh dan peneliti.

Selain itu, juga terdapat model yang disebut dengan hubungan "model triangular," yaitu antara fungsi penelitian, penyuluhan, dan pengguna terjadi saling hubungan, sehingga membentuk segitiga hubungan timbal balik (*triangular*). Model-model kedua ini lebih menekankan bahwa penyuluh perlu berhubungan dengan peneliti untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, atau harus terjalin hubungan timbal balik antara ketiganya, yaitu: unsur peneliti, penyuluh, dan masyarakat pengguna. Hubungan antara ketiganya bisa setara.



Model ini menyarankan, harus dapat terjadi hubungan yang baik antara ketiga unsur yaitu: peneliti, penyuluh, dan masyarakat pengguna. Namun, dalam kegiatan pengembangan masyarakat, ternyata masih terdapat unsur lain dengan fungsi lain diluar penelitian dan penyuluhan, seperti misalnya kebijakan pengembangan masyarakat atau kearah mana pengembangan akan dilakukan.

Artinya, mungkin dengan “model triangular”pun mungkin belum juga menjawab kebutuhan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam pemberdayaan masyarakat antara lain :

- a. Pengembangan organisasi/kelompok masyarakat yang dikembangkan dan berfungsi dalam mendinamisir kegiatan produktif masyarakat.
- b. Pengembangan jaringan strategis antar kelompok/organisasi masyarakat yang terbentuk dan berperan dalam pengembangan masyarakat.
- c. Kemampuan kelompok masyarakat dalam mengakses sumber-sumber luar yang dapat mendukung pengembangan mereka, baik dalam bidang informasi pasar, permodalan, serta teknologi dan manajemen, termasuk didalamnya kemampuan lobi ekonomi.
- d. Jaminan atas hak-hak masyarakat dalam mengelola sumberdaya lokal.
- e. Pengembangan kemampuan-kemampuan teknis dan manajerial kelompok-kelompok masyarakat, sehingga berbagai masalah teknis dan organisasi dapat dipecahkan dengan baik.
- f. Terpenuhinya kebutuhan hidup dan meningkatnya kesejahteraan hidup mereka serta mampu menjamin kelestarian daya dukung lingkungan bagi pembangunan.

Memperhatikan uraian di atas, kini sampailah kita untuk memilih suatu paradigma tertentu dalam pengembangan masyarakat , yaitu paradigma yang memihak pada rakyat melalui pemberdayaan masyarakat.

Sebagai aplikasi bagi pemberdayaan masyarakat dalamkaji tindak, dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat sebagai berikut :

1. Belajar Dari Masyarakat

Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa penyuluhan untuk pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri.

2. Penyuluh sebagai Fasilitator, Masyarakat sebagai Pelaku

Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya penyuluh menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Kalaupun pada awalnya peran penyuluh lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.

3. Saling Belajar, Saling Berbagi Pengalaman

Salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Namun sebaliknya, telah terbukti pula bahwa pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak juga memecahkan masalah mereka. Bahkan dalam banyak hal, malah menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Karenanya harus dilihat bahwa pengalaman dan pengetahuan masyarakat dan pengetahuan penyuluh/pelaku kaji tindak atau inovasi harus saling melengkapi dan sama bernilainya.

KAJI TINDAK:

SUATU BENTUK RISET YANG MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT

Kegiatan kaji tindak (riset aksi) telah dimulai sejak lama oleh ilmuwan Kurt Lewin yaitu tahun 1946, dan telah dimanfaatkan oleh banyak kalangan, baik aktivis/praktisi pengembangan masyarakat, pendidik maupun peneliti ilmu sosial.

Kaji tindak muncul merupakan koreksi dari perspektik teori kritis bahwa meniru pendekatan ilmu empiris yang tidak cocok untuk studi tentang manusia. Ia muncul sebagai riset alternatif dalam ilmu sosial. Ia berusaha menjadi riset paradigma baru yang berbeda dengan logika positivis dan empiris.

Model yang diterapkan dilapangan, meliputi empat langkah, yaitu: **aksi/mengalami, refleksi, integrasi, dan perencanaan**. Sebagai proses kegiatan operasionalnya menekankan pragmatisme yang dimulai dari mengidentifikasi, memahami, dan memecahkan masalah riil, lalu merefleksikannya lagi. Menurut Lewin (Dilts,1999), hal-hal praktis jika diikuti dengan refleksi dan analisis, akan merupakan sumber yang tak bakal kering bagi bahan pengembangan teori (yang dikembangkan dari lapangan). Karena dalam kenyataannya teori yang demikian jika digunakan sebagai alat analisis akan memberikan contoh praktis yang diterapkan para situasi riil.

Dalam perkembangannya, ada varian lain dari riset paradigma bari yaitu riset partisipatif. Ia memiliki banyak ciri yang sama dengan riset aksi antara lain, pentingnya refleksi, tujuan untuk adanya perubahan /perbaikan sosial atau dampak langsung terhadap sistim/struktur sosial, penghargaan yang tinggi terhadap potensi manusia, dan pemecahan masalah, serta penciptaan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam riset partisipatif, menurut Dilt (1999) lebih komitment terhadap ideologis yaitu perubahan sosial dan keadilan sosial. Sementara riset aksi lebih menekankan adanya komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat (*empowerment*), partisipasi dan kontrol masyarakat dalam proses riset.

PENERAPAN KAJI TINDAK DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Untuk menerapkan prinsip kaji tindak dalam pemberdayaan masyarakat, secara ringkas diusulkan langkah sebagai berikut (Karsidi, 2001):

1. Pengenalan masalah/kebutuhan dan potensi serta penyadaran. Pada tahap awal ini digali informasi-informasi yang mengungkapkan keberadaan lingkungan dan masyarakatnya secara umum serta melakukan analisa dan refleksi atas keberadaan itu.

2. Perumusan masalah dan penetapan prioritas. Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengkajian informasi tersebut, diperoleh catatan yang memuat berbagai masalah dan potensi (setempat).
3. Identifikasi alternatif-alternatif pemecahan masalah/pengembangan gagasan. Dari prioritas masalah yang telah ditetapkan, selanjutnya dapat dibahas berbagai kemungkinan pemecahan masalah-masalah tersebut melalui urun-rembuk (*brain storming*) dan pengembangan gagasan oleh sasaran penyuluhan.
4. Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling tepat. Selain ketepatangunaan pemecahan itu secara umum, pertimbangan penting dalam hal ini adalah kemampuan sasaran penyuluhan dan sumberdaya yang tersedia untuk dapat menerapkan pemecahan itu secara swadaya. Untuk itu bagian dari mencari alternatif ini adalah pengenalan sumberdaya tersebut.
5. Perencanaan kegiatan; yang selanjutnya dituangkan ke dalam sebuah rencana kegiatan yang konkrit. Rencana itu perlu menyatakan dengan jelas apa yang akan dilakukan, siapa yang akan melakukannya, dan kapan waktu pelaksanaannya. Makin konkrit dan jelas rencana yang dihasilkan, makin besar kemungkinan bahwa rencana itu sungguh-sungguh akan dilakukan. Guna mendapatkan masukan bagi penyempurnaannya, hasil tersebut selanjutnya disajikan melalui suatu diskusi antara penyuluh dengan sasaran penyuluhan (jika ini dalam bentuk kelompok, maka dapat diselenggarakan pertemuan yang diikuti oleh kelompok).
6. Pelaksanaan/Pengorganisasian. Betatapun canggihnya suatu rencana, rencana itu baru akan bermakna jika kemudian sungguh-sungguh dilakukan. Pengorgani-sasian itu bisa konkrit dan sederhana ataupun bisa canggih dan mendasar sampai mengarah pada pengembangan kelembagaan.
7. Pemantauan dan pengarahan kegiatan. Semua kegiatan yang kemudian dilaksanakan perlu dipantau secara berlanjut oleh penyuluh bersama sasaran penyuluhan untuk melihat kesesuaiannya dengan rencana yang telah disusun. Jika menyimpang, tentu perlu diusahakan tindakan-tindakan yang sesuai untuk mengarahkannya kembali.
8. Evaluasi dan rencana tindak lanjut. Setelah suatu tahapan kerja selesai, maka hasilnya dievaluasi, apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR ACUAN

Dilts, Russ. 1999. Dasar-Dasar Riset Aksi, Kritik terhadap Paradigma Riset Panutan dan Dampaknya bagi Kegiatan Sosial, Bahan Latihan Riset aksi, UNS-LPTP-IDRC.

Karsidi, Ravik.2001.Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Pambudy dan A.K.Adhy (ed.): Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani, Bogor: Penerbit Pustaka Wirausaha Muda.

Lacy, William R. 1995 . Strategic for Change Research: Extention and User Partnership. Makalah.

Mudjiman, Haris. 1997. Riset aksi sebagai Metode Pembinaan Masyarakat Desa. Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Sbelas Maret.

